

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil data penelitian yang ada di lapangan dapat di susun suatu kesimpulan bahwa efektivitas dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah daerah kota Malang untuk pendidik atau guru di kota Malang. Dengan memberikan kesempatan pendidik untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, menurut Pasal 12 Ayat 1 Huruf h Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2014 dapat dikatakan efektif..

1. Dari hasil penelitian di dua tempat instansi atau lembaga yang berbeda yaitu di SMA Panjura kota Malang dan di Dinas Pendidikan kota Malang dapat dilihat bahwa dua lembaga ini telah berusaha melaksanakan kebijakan yang diamanahkan dalam peraturan daerah kota Malang No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kota Malang dengan sebaik mungkin dalam hal berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang.
2. Dalam hal pelaksanaanya memang ada beberapa faktor penghambat yang dialami pendidik dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan menjadi penghambat seperti adanya sistem kurikulum pendidikan yang terus berubah – ubah dan

keengananan pendidik untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru.

3. Adapun faktor pendukung yang dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala dan penghambat tersebut adalah disini fungsi Dinas Pendidikan kota Malang untuk terus mendukung dan memotivasi pendidik dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi pendidikan sehingga pendidik memiliki semangat dan etos kerja yang baik dan tentunya dalam hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Malang tetap memberikan kesempatan yang luas bagi pendidik untuk mengemukakan pendapat terkait dengan substansi dari isi kurikulum baru sehingga Dinas Pendidikan kota Malang pun membuka kesempatan untuk merubah atau revisi jika memang memungkinkan dan menjadi mufakat keputusan bersama.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah daerah kota Malang dalam rencana kedepan harus bisa menyusun kebijakan tentang sistem pendidikan di kota Malang yang lebih rinci lagi supaya lebih memberikan pedoman kepada pendidik atau guru dalam hal mengembangkan sistem pendidikan sekolah dan di kota Malang.
2. Bagi SMA Panjura kota Malang harus terus memberikan dukungan dan kesempatan kepada pendidik atau guru muda untuk terlibat dalam hal menyusun kebijakan pendidikan di sekolah atau terkait dengan

menyusun sistematika pendidikan di sekolah agar memiliki pengalaman dan kemampuan yang kelak dapat menjadi penerus dari pendidik sebelumnya dan juga terus bersinergi dengan Dinas Pendidikan kota Malang dalam hal supaya terus bisa mengembangkan kemampuan pendidik dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum pendidikan yang terus berubah – ubah.

3. Bagi Dinas Pendidikan kota Malang harus terus berkerja sama dan meningkatkan dukungan kepada semua lembaga pendidikan sekolah baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta dalam hal mengembangkan kualitas mutu pendidikan dan peningkatan prestasi murid di kota Malang dan juga memberikan sosialisai dan pelatihan terus kepada pendidik seluruh SMA baik negeri atau swasta di kota Malang supaya dapat meningkatkan integritas dalam mengajar peserta didiknya dan juga terkait dengan kurikulum yang terus berubah – ubah supaya Dinas Pendidikan di Kota Malang selalu memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait dengan penjelasan dan pemaparan isi dari sistem kurikulum yang baru sehingga pendidik atau guru yang usianya sudah lanjut dapat menyesuaikan diri dengan kurikulum pendidikan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, Nanang.2012.Analisis Kebijakan Pendidikan.Bandung:PT. Remaja Rosdarykaria
- Gunawan, H Ary.1986.Kebijakan – Kebijakan Pendidikan.Jakarta:PT Rineka Cipta
- Islamy,M Irvan.2009.Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Lindblom,E Charles.(alih bahasa: Ardian Syamsudin).1986.Proses Penetapan Kebijaksanaan.Jakarta:Erlangga (Anggota IKAPI)
- Mujtahid.2012.Perkembangan Profesi Guru.Malang:UIN Maliki Prees ( anggota IKAPI)
- M.Steers, Richard.2005. Efektivitas Organisasi.Jakart:Erlangga
- Rahardjo, Mudjia.2010.Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer.Malang. :UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Sudirman.2002.Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap efektivitas Pelayanan. Bandung: Primako Akademika
- Soekamto, Soerjono.2012.Dasar – Dasar Ilmu Hukum.Jakarta:Sinar Grafika
- Sahatepy,JE.1992.Teori Kriminologi Suatu Pengantar .Bandung.:Citra Aditya bakti
- Zainal Abidin,Said.2012.Kebijakan Publik.Jakarta:Salemba Humanika

## Undang – Undang

UU.No20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang – undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586)

Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2014, Tentang Sistem Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10)

## Internet

<http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 3 september 2015, pukul 17.26

<http://www.kajianteori.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>, diakses tanggal 3/9/2015 pukul 17.49

<http://Malangkota.go.id/selilas-malang/sejarah-malang/>. diakses tanggal 16/10/2015 pukul 18.30

<http://halomalang.com/serba-serbi/asal-usul-nama-malang>, diakses tanggal 13/11/2015 pukul 12.20 wib

[http://diknas.malangkota.go.id/?page\\_id=2](http://diknas.malangkota.go.id/?page_id=2), diakses tanggal 30/11/2015, pukul 15.30